

HARIAN PAGI Tribun Jateng

The Best of Java Newspaper

SPIRIT BARU JAWA TENGAH

Alamat Redaksi/Iklan:
Gedung Kompas Gramedia
Jl. Menteri Supeno 30
Semarang 50241
Telp: (024) 845 5959
Fax: (024) 845 6776

SENIN LEGI
23 OKTOBER 2017
3 SHAFAR 1439
TAHUN IV/NOMOR 1618

Harga: Rp 1.000

Langganan: Rp 29.000

Harga khusus Solo: Rp 2.000 ■

Langganan: Rp 55.000 ■

www.tribunjateng.com

NEWS ANALYSIS

PROF SRI SUWITRI

KAPRODI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNDIPI

Terlalu Berani

TERLALU berani (pungli pembuatan e-KTP) karena akan mudah diusut. Kekurangan e-KTP ini terjadi di semua daerah di Indonesia, sehingga semua kebijakan untuk memenuhi kebutuhan jumlah e-KTP.

■ KE HALAMAN 7



Terlalu Berani

Jika ada yang berani memberikan e-KTP yang sangat terbatas dengan embel-embel ekspres, apalagi juga 'wani piro', maka akan cepat terendus.

Problem e-KTP ini tentu saja disebabkan karena ada kaitannya dengan kasus korupsi e-KTP. Anggaran tidak mencukupi untuk pembuatan lagi, sehingga jumlah yang dibagikan ke kabupaten/kota tidak sesuai dengan kebutuhan.

Bukan distribusi tersendat, tapi jumlah yang didistribusikan kurang. Tidak sesuai antara jumlah e-KTP dengan jumlah penduduk yang membutuhkan.

Pemkab/pemkot tentu saja sulit untuk memberikan dengan jumlah yang kurang.

Pasti ada yang dapat dan ada yang tidak. Bisa menimbulkan keresahan.

Kalau saat kondisi seperti ini ada oknum berani bikin program ekspres, artinya 'woow banget'. Terlalu berani, karena sedang jadi sorotan dan mudah memicu keresahan masyarakat.

Atau mungkin unsur kesengajaan agar masyarakat tidak melupakan begitu saja kasus e-KTP? Kalau ini benar, berarti ada yang berani dikorbankan.

Menanggapi fenomena ini, solusinya menurut saya, berikan sebagaimana mestinya. Transparan tentang jumlah yang diterima, dan setiap hari telah berapa yang diberikan ke masyarakat. Maka yang tidak menerima akan paham.

■ DARI HALAMAN 1

Tapi jika diberikan oknum dengan cara ekspres, akan menjadi korupsi modus baru lagi dari skandal e-KTP. Ini sangat melukai hati rakyat.

KTP merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di Banyuwangi, pelayanan publik sudah lebih baik dengan hadirnya mal pelayanan publik.

Masyarakat datang ambil nomor, lalu menuju loket yang diperlukan. Tempatnya nyaman, serta memberi peluang transparansi dan kemudahan. Minimalkan pungli.

Masih berani ada pelayanan ekspres dengan cara begini? Di mana masyarakat berkumpul sangat banyak? Ada kekecewaan pelayanan langsung tersebar dengan cepat. Di mal pelayanan publik juga langsung ada pelayanan transfer bank ke kas daerah,

jadi meminimalkan pungli. Ada fasilitas untuk difabel pula. Fasilitas ini ada di Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi.

Hal itu merupakan niat baik pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberantas oknum pelayanan ekspres. Terdapat lounge pelayanan publik pembak, di mana terdapat delapan monitor untuk mengakses transparansi Planning Organizing Accounting Controlling.

Layanan yang tersedia di mal pelayanan publik itu mulai dari regulasi pemda, anggaran, perencanaan, tata ruang e-budgeting learning, semua satker, serta cctv yang memantau semua aktivitas layanan organ isa-si perangkat daerah (OPD) yang disounding ke iphone bupati. (tim)